

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran visi. Misi dan program Kepala SKPD yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama-sama dengan para pejabat struktural Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Tahun 2009-2013 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DIY.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala SKPD ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD.

2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Renstra  
Musrenbang Renstra diselenggarakan oleh Bidang Perencanaan dan Standarisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY yang diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, dengan materi rancangan awal Renstra.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.  
Berdasarkan hasil Musrenbang Renstra, Bidang Perencanaan dan Standarisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY menyusun Rancangan Akhir Renstra.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### 1. Maksud

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

### 2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

## **C. Landasan Hukum**

Dalam menyusun Renstra Tahun 2009-2013, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

### 1. Landasan Idiil

Dasar Negara RI yaitu Pancasila

### 2. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara RI yaitu UUD 1945

### 3. Landasan Operasional

- a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- h) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- r) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- s) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
- t) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - u) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;
  - v) Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY;
  - w) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;
  - x) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  - y) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013.

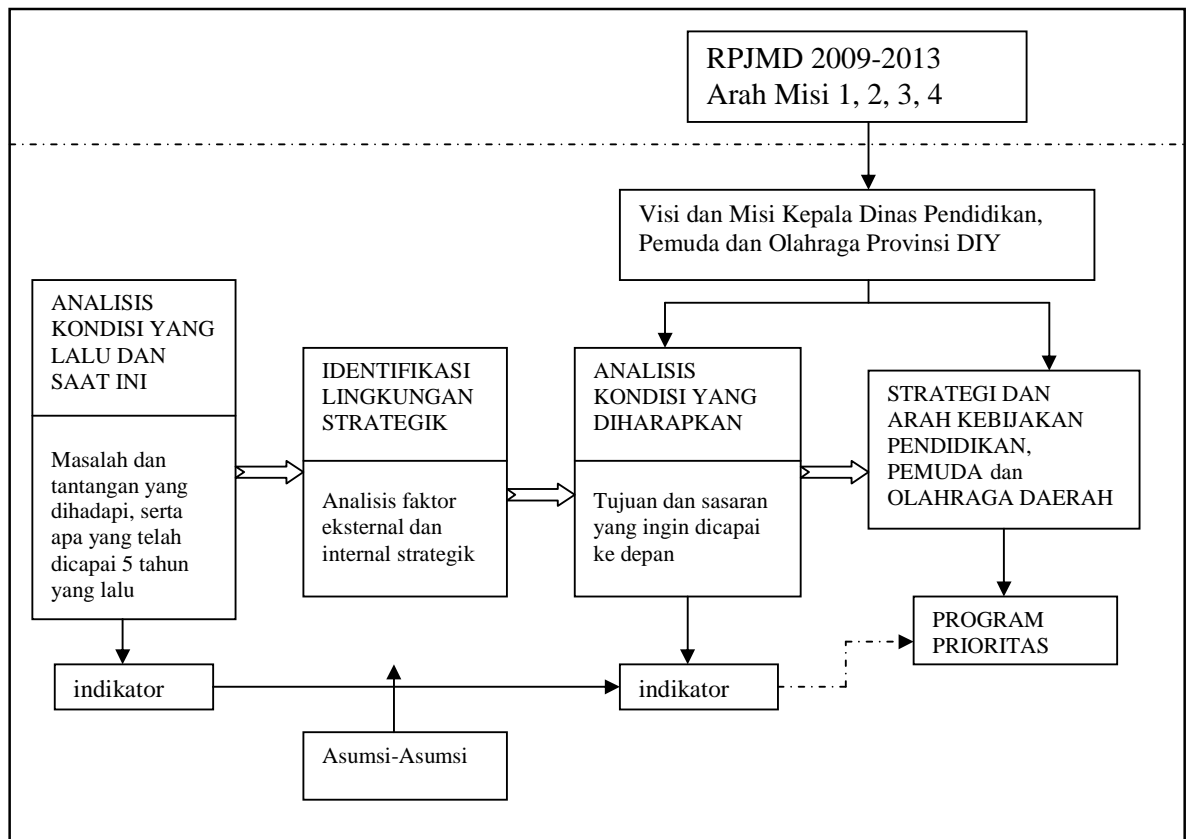
#### **D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

1. Hubungan Renstra dengan RPJMD  
RPJMD merupakan dokumen jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD yang disusun oleh SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.
2. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)  
Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra.
3. Hubungan Renstra dengan Rencana Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Renop Dinas Pendidikan Kab/Kota)  
Renop-Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah dokumen operasional SKPD pada tingkat kab/kota untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai rencana kerja operasional SKPD Tingkat Kab/Kota dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.

#### **E. Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan**

## 1. Kerangka Pikir

Penyusunan Renstra diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pendidikan, pemuda dan olahraga daerah serta program-program pendidikan, pemuda dan olahraga dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJMD.



## 2. Sistematika Penulisan

Renstra Tahun 2009-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Pendidikan
- Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Arah Kebijakan Pendidikan Daerah
- Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator
- Bab VII : Penutup

## **BAB II**

### **KONDISI PENDIDIKAN**

#### **A. Kondisi Instansi**

##### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemerintahan Daerah dan PP 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka sesuai dengan amanat Perda 4 Tahun 2001 mengenai Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Propinsi DIY dan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Propinsi DIY, maka Kantor Wilayah Pendidikan Propinsi DIY berubah menjadi Dinas Pendidikan Propinsi DIY. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2004 dikeluarkannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP pengganti UU Nomor 3 tahun 2005 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai Pelaksanan atas peraturan hukum tersebut diatas, melalui Perda 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukanlah perubahan dari Dinas Pendidikan Propinsi DIY menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.

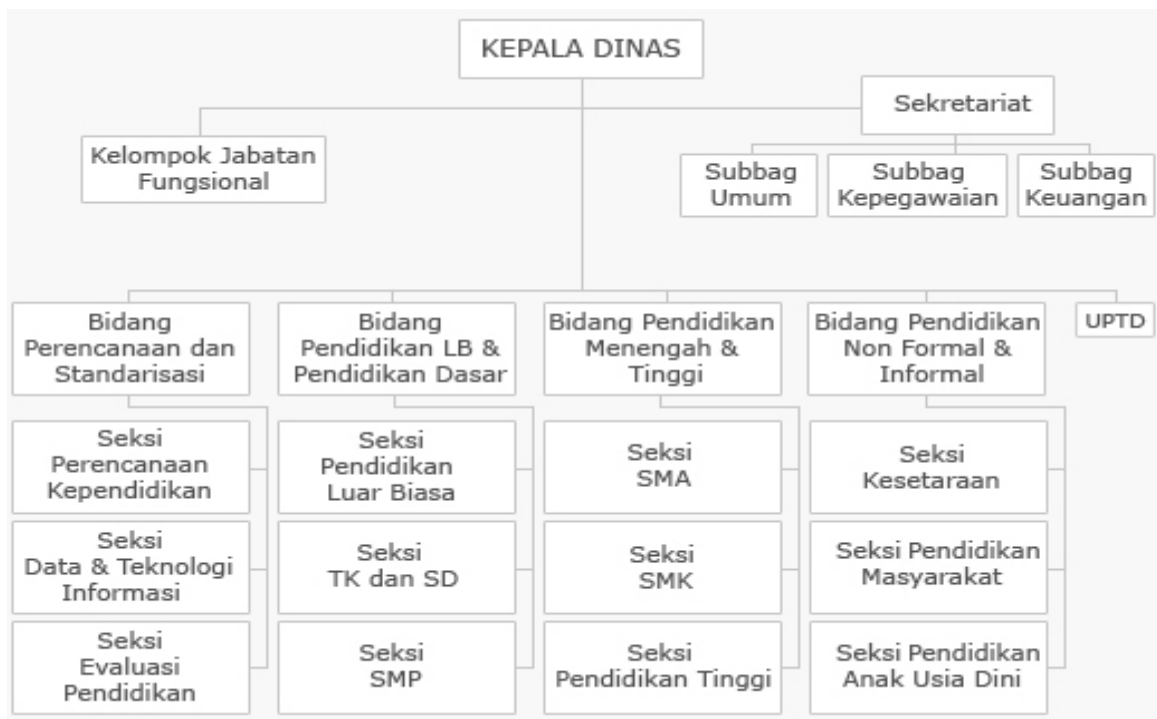
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY memiliki 4 (empat) UPTD yaitu Balai Latihan dan Pendidikan Teknik (BLPT), Balai Pemuda dan Olahraga (BPO), Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB).

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Guna melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan pengendalian di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

- c. Pengembangan, pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Berstandar Internasional;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
- f. Pemberdayaan sumberdara dan mitra kerja di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g. Melaksanakan kegiatan tatausahaan;
- h. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



## 2. Kepegawaian

Sumber daya manusia Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY adalah sebanyak 230 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 137 orang dan pegawai perempuan sebanyak 93 orang. Tingkat pendidikan S1, S2 dan S3 adalah sebanyak 144 orang, tingkat pendidikan D3 dan D2 sebanyak 10 orang.

Pegawai dalam golongan IV dan III dengan tingkat pendidikan SI, S2 dan S3 adalah sebanyak 141 orang dan 3 orang dalam golongan II.

Sumber daya manusia UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY adalah sebanyak 243 orang pegawai, dengan jumlag pegawai laki-laki sebanyak 167 orang dan pegawai perempuan sebanyak 76 orang. Tingkat pendidikan S1, S2 dan D3 adalah sebanyak 126 orang. Pegawai dalam golongan IV dan III dalam tingkat pendidikan S2, S1 dan D3 ada 125 orang, dengan 1 orang golongan II dengan tingkat pendidikan S1.

### 3. Sarana Prasarana Instansi

Sarana prasarana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY terdiri dari :

Tabel sarana prasarana instansi :

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	Tanah	29 bidang
2	Alat-alat besar	1 unit
3	Alat-alat angkut	
	- Mobil (roda empat)	26 unit
	- Motor (roda dua)	43 unit
4	Alat-alat bengkel dan alat ukur	973 unit
5	Alat-alat pertanian/peternakan	16 unit
6	Alat-alat kantor dan rumah tangga	10.178 unit
7	Alat-alat studio dan komunikasi	305 unit
8	Alat-alat kedokteran	78 unit
9	Alat-alat laboratorium	819 unit
10	Bangunan gedung	149 gedung
11	Buku perpustakaan	18.349 buku
12	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	139 unit
13	Konstruksi dalam pengerjaan	2 unit

Sarana prasarana tersebut diatas dimiliki Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY namun penggunaan dan pemanfaatannya tersebar di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sendiri, di UPTD maupun di SLB-SLB Negeri. Dimana penggunaan dan pemanfaatan dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

## **B. Kondisi Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Menurut pengertian Yunani pendidikan adalah “*Pedagogik*” yaitu ilmu menuntun anak. Bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yaitu : membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan /potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Perencanaan dan perancangan pendidikan pada hakekatnya merupakan pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan yang terpadu. Eksploitasi sumber daya manusia yang tidak memperhatikan kearifan lokal diduga akan menyebabkan krisis identitas. Pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan melalui proses perencanaan dan perancangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Penerapan kearifan lokal (lokal wisdom) merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), pendekatan kontekstual serta pendekatan partisipatif.

Penggalian konsep/teori serta best practices tentang kearifan lokal atas hasil rancangan masa lalu (traditional setting, modern setting) melalui design review maupun design practices sebagaimana merupakan suatu upaya dalam rangka “penyempurnaan” proses dan pendekatan perancangan pendidikan. Pemahaman atas potensi kearifan lokal dari stakeholder (akademisi, praktisi dan birokrat) menjadi penting dalam pemanfaatan penciptaan pola pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY berusaha untuk mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekuensi dari

perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sejalan dengan itu adalah peran dan fungsi utama pemerintahlah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya sehingga semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan adalah suatu aktifitas yang tidak dapat berdiri sendiri, ada berbagai macam segi dan aspek kehidupan dalam masyarakat yang berkait dengan pendidikan itu sendiri. Untuk memahami bagaimana pendidikan tersebut maka haruslah pula dipahami macam segi dan aspek kehidupan yang terkait tersebut, yang secara garis besar segi dan aspek umum dapat dijabarkan adalah sebagai berikut :

- a) Tingkatan sosial dan ekonomi masyarakat yang belum merata dan setara sehingga tidak semua masyarakat/penduduk dalam usia sekolah yang mendapat pendidikan secara formal.
- b) Pola pikir masyarakat secara umum yang masih memandang sekolah hanya menghabiskan uang, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu akan lebih memilih untuk bekerja ketimbang bersekolah.
- c) Sumber daya manusia yang belum kompeten dan kompetitif untuk bersaing dalam arus globalisasi karena tidak mempersiapkan kemampuan dan kelebihan diri.
- d) Kualitas dan kuantitas pendidikan yang masih belum mampu untuk ikut bersaing dalam era persaingan globalisasi.
- e) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat diluar Provinsi DIY yang masih tinggi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tujuan yang aman, nyaman dan tenang untuk pendidikan dan menuntut ilmu.
- f) Kondisi masyarakat yang pada dasarnya adalah homogen mampu dan bisa beradaptasi dengan penduduk baru yang lebih heterogen dan majemuk, sehingga terjadi asimilasi penduduk secara damai dan nyaman.
- g) Terjalannya hubungan saling menguntungkan antara penduduk asli Yogyakarta dengan pendatang yang dapat dilihat dari semakin banyaknya warung/rumah makan, rumah kost-kostan, kios buku dan sentra-sentra ekonomi lainnya.

- h) Biaya hidup dan makan sehari-hari yang rata-rata masih murah dan sesuai dengan biaya hidup mahasiswa pendatang pada umumnya.
- i) Keterbukaan dalam masyarakat yang padat dan heterogen juga membuka adanya persoalan negative yang bertambah marak seperti penyalahgunaan obat-obatan, pergaulan bebas dan perbuatan kriminal lainnya.
- j) Dinamika pergaulan pelajar dan mahasiswa di DIY yang mulai mengkhawatirkan dimana dapat mengancam eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan tujuan pendidikan.
- k) Keterlekatan dalam benak dan pikiran masyarakat luas bahwa Yogyakarta adalah kota pendidikan dengan kondisi masyarakat yang tenang dan nyaman menjadikan nilai lebih dari Yogyakarta.
- l) Tumbuhnya berbagai lembaga/institusi pendidikan baik jalur formal maupun nonformal yang mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.
- m) Persaingan ketat dan tidak sehat yang tercipta antar lembaga/ institusi pendidikan formal maupun nonformal dalam memperoleh mahasiswa/siswa/anak didik /warga belajar yang diluar kontrol pemerintah dan masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat itu sendiri.
- n) Terbentuknya lembaga-lembaga partner pendukung bidang pendidikan seperti dewan pendidikan provinsi/kab/kota, komite sekolah, majelis pendidikan kejuruan dan sebagainya.
- o) Perhatian dan antusias dari pengusaha yang bergabung dalam IKADIN provinsi/kab/kota dalam peningkatan mutu bidang pendidikan.
- p) Fasilitas pendukung pendidikan tersedia di Provinsi DIY sebagai penyokong kehidupan sosial budaya masyarakat.
- q) Kemudahan dan ketersediaan layanan system teknologi informasi baik yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, tempat-tempat hiburan maupun warnet dalam rangka mendukung pendidikan dalam era globalisasi.
- r) Terbatasnya penggunaan system teknologi informasi dalam mekanisme belajar mengajar di sekolah-sekolah meski layanan system teknologi informasi ini tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah.
- s) Kondisi masyarakat yang masih menganut dan mendasar pada nilai-nilai sosial budaya lokal sehingga memiliki karakter khas Yogyakarta yang hangat, ramah dan sederhana sebagai daya tarik tersendiri.

- t) Peran serta dan perhatian masyarakat akan peningkatan mutu pendidikan yang belum optimal, meskipun masyarakat bersikap semakin kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- u) Dinamika dan semangat insan pendidikan yang secara umum masih belum optimal dalam menunjukkan kemampuan dan prestasi keilmuannya.
- v) Kebutuhan akan buku bacaan yang semakin tinggi dari siswa dan mahasiswa di Provinsi DIY namun tidak diimbangi dengan kesediaan layanan tempat-tempat bacaan umum seperti pusat-pusat bacaan dan perpustakaan umum.
- w) Prestasi dan unjuk kemampuan dari siswa dan mahasiswa di Provinsi DIY melalui berbagai perlombaan ataupun festival dibidang keilmuan, olahraga/seni dan kepemudaan.
- x) Masih rendahnya minat masyarakat secara umum untuk membaca, menulis dan meneliti, terlebih lagi untuk membentuk komunitas pembelajaran yang peduli pendidikan yang bermutu dan berprestasi, *Life Long Learning Community*.
- y) Sistem dan organisasi kemasyarakatan seperti RT/RW dan lembaga masyarakat lainnya belum memiliki kontribusi fungsi dan peran yang optimal dalam bekerjasama dan menunjang untuk peningkatan mutu pendidikan dan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan.

### **1. TK – Taman Kanak Kanak**

Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) saat ini adalah sebanyak 2.126 TK, dengan 14 TK Negeri dan 2.112 TK Swasta. TK-TK tersebut memiliki 3.956 kelas dan 4.017 ruang kelas mampu menampung 79.343 siswa dengan diampu oleh 7.090 guru. Rasio siswa per guru adalah 11, dimana rasio siswa per kelas adalah 20.

Lulusan TK pada umumnya melanjutkan ke tingkat SD/MI dengan kemampuan sosialisasi dengan teman-teman yang sudah cukup kuat dan bekal materi akan pengetahuan dasar yang dibutuhkan dalam menempuh pelajaran kelas I SD/MI.

Meskipun demikian patut pula diperhatikan berdasar hasil pengamatan di lapangan bahwa masih banyak gedung-gedung TK masih merupakan hasil swadaya masyarakat, dengan peralatan sekolah, permainan dan buku-buku penunjang yang belum memadai. Patut pula menjadi perhatian adalah guru TK, dimana kebanyakan dari mereka adalah guru honorer dengan kondisi mengajar sama seperti guru bukan honorer bahkan mungkin lebih berat namun memiliki penghasilan yang masih rendah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

## **2. SD – Sekolah Dasar**

Jumlah ketersediaan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) untuk kurun waktu sekarang adalah 2.025 sekolah yang terdiri atas 1.879 SD (1.496 SD Negeri dan 383 SD Swasta) dan 146 MI (19 MI Negeri dan 127 MI Swasta). Meliputi 14.115 ruang kelas SD dan 942 ruang kelas MI, yang mampu menampung rombongan belajar sebanyak 14.100 rombel dengan rombel SD sejumlah 13.201 dan 899 rombel MI. Yang mencakup 307.282 siswa dengan 294.743 siswa SD dan 12.539 siswa MI.

Ketersediaan guru yang mengajar sebanyak 23.542 orang yang terbagi 21.877 orang untuk guru SD dan 1.665 orang guru MI. Adapun penduduk usia 7-12 th seluruhnya berjumlah 283.087 penduduk, dimana siswa SD usia 7-12 th sebanyak 256.958 orang dan 10.869 orang untuk siswa MI. Sedangkan untuk paket A setara SD diikuti oleh 340 orang.

Kualitas sumber daya pendidikan di SD antara lain dapat dikemukakan, dari 23.542 guru yang mengajar di SD/MI telah dinyatakan layak mengajar sebanyak 83.46%, semi layak 5.11% dan tidak layak untuk mengajar sebanyak 11.43%, sedangkan berdasarkan data guru yang mengikuti kualifikasi S1/D4, S2 dan S3 adalah 8.379 guru, dimana guru SD yang telah mendapatkan sertifikasi sebanyak 2.741 orang atau sebesar 32.71%.

Fasilitas yang ada di SD dan MI meliputi perpustakaan sejumlah 993 untuk SD dan 51 di MI, Lapangan olahraga yang digunakan di SD sebanyak 473 lapangan sedangkan untuk MI sebanyak 19 lapangan, dan ketersediaan UKS di SD sejumlah 1.321 dimana UKS untuk MI tersedia 47 UKS.

Indikator pendidikan pada SD/MI dapat dijabarkan dari segi pemerataan pendidikan APK SD/MI yang mencapai 108.82%, APM SD/MI mencapai 94.73%, dengan APS Anak Usia Sekolah 7-12 th mencapai 104.75%. Angka putus sekolah sebanyak 0.06%, dengan angka kelulusan yang mencapai 99.65%, dimana angka mengulang mencapai 3.81%, sedangkan angka melanjutkan sebesar 103.73% Kemudian rasio kelas/ruang kelas ada 0.94%, rasio siswa/kelas sebesar 22 dan rasio siswa/guru sebesar 12.

Dari segi manajemen, sekolah sudah melaksanakan manajemen Berbasis Sekolah dengan bekerjasama dengan Komite Sekolah, namun demikian dari segi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pelaksanaannya masih belum optimal dan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

## **3. SMP – Sekolah Menengah Pertama**

Terdiri dari SMP dan MTs yang saat ini tersedia 421 SMP (terdiri atas 213 SMP Negeri dan 208 SMP Swasta) dan 85 MTs, sedangkan untuk SMP Terbuka sebanyak 18 sekolah. Dengan jumlah ruang kelas untuk SMP sebanyak 4.112 ruang, 692 ruang kelas MTs dan 45 ruang kelas untuk SMP Terbuka. Yang dapat menampung 3.918 rombel SMP, 637 rombel MTs dan 38 rombel SMP Terbuka. Keseluruhan jumlah murid sebanyak 149.870 siswa yang terbagi untuk siswa SMP sejumlah 129.285 siswa, 20.090 siswa MTs dan 495 siswa SMP Terbuka. Jumlah penduduk usia sekolah 13 - 15 th adalah 143.366 orang. Terinci sebagai berikut murid SMP menurut kelompok umur 13-15 th sebanyak 98.111 siswa, 15.213 siswa MTs dan 394 untuk siswa SMP Terbuka. Sedang untuk warga belajar paket B menurut kelompok umur 13-15 th, sebanyak 7.630 orang.

Kualitas sumber daya pendidikan di SMP, keseluruhan guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 13.110 dan 297 guru yang mengajar di SMP Terbuka. Dari seluruh guru yang mengajar di SMP dan MTs dapat dikategorikan guru layak mengajar sebanyak 83.56%, guru semi layak mengajar 7.54% dan guru tidak layak mengajar 8.89%. Sementara itu, guru yang mengikuti kualifikasi SI/D4, S2 dan S3 untuk tingkatan SMP sebanyak 8.191 orang dan yang telah memperoleh sertifikasi sejumlah 2.190 orang atau 26.74%.

Fasilitas yang tersedia di SMP dan MTs terdiri dari perpustakaan yang mencapai 388 perpustakaan untuk SMP dan 75 perpustakaan MTs, 205 lapangan olahraga SMP dan 34 lapangan olahraga MTs, 344 UKS SMP dan 56 UKS MTs, dan laboratorium yang dapat digunakan sebanyak 948 di SMP dan 131 di MTs.

Indikator pendidikan pada SMP/MTs dapat dijabarkan dari pemerataan nilai APK SMP/MTs sebesar 114.98%, APM SMP/MTs yang mencapai 84.64%, dengan APS Anak Usia Sekolah 13-15 th sebesar 110.61%. Angka kelulusan mencapai 90.18%, kemudian angka melanjutkan sebesar 106.61%, sedangkan angka mengulang mencapai kisaran 0.33%, namun angka putus sekolah mencapai 0.16%. Untuk rasio kelas/ruang kelas sebesar 0.95, rasio siswa per kelas sebesar 33, dan rasio siswa/guru adalah 11.

Dari segi prestasi, rata-rata nilai hasil ujian nasional SMP tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut :

* Bahasa Indonesia	: 7.93
* Bahasa Inggris	: 6.34
* Matematika	: 6.99
* IPA	: 6.55

Dari segi manajemen, sekolah sudah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan bekerjasama dengan Komite sekolah, namun demikian dari segi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pelaksanaannya masih belum optimal dan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

#### **4. SM – Sekolah Menengah**

Sekolah menengah terdiri atas SMA, SMK dan MA. Yang terdiri dari 171 SMA (69 SMA Negeri dan 102 SMA Swasta), 182 SMK (46 SMK Negeri dan 136 SMK Swasta) dan 37 MA (14 MA Negeri dan 23 MA Swasta). Untuk tingkatan SMA mempunyai 1.948 ruang kelas, SMK memiliki 2.017 ruang kelas, dan untuk MA sendiri ada 360 ruang kelas. Dimana ruang kelas tersebut dapat menampung 1.731 rombel SMA, 2.246 rombel SMK dan 336 rombel MA. Jumlah siswa yang tertampung di tingkatan SMA sebanyak 52.237 siswa, tingkatan SMK sejumlah 67.808 siswa dan MA sendiri mempunyai 8.534 siswa. Untuk data penduduk usia sekolah 16 – 18 th sebanyak 162.056 orang dimana menurut usia anak sekolah 16 -18 th maka 38.811 orang adalah siswa SMA, 48.613 orang merupakan siswa SMK dan 6.088 adalah siswa MA.

Kualitas sumber daya pendidikan SM, keseluruhan guru yang mengajar pada tingkat SMA, SMK dan MA adalah 14.404 orang, dengan rincian 5.865 guru SMA, 7.187 guru SMK dan 1.352 guru MA. Dari keseluruhan guru yang mengajar di tingkat SMA, MA dan SMK maka dapat dikategorikan sebagai guru layak mengajar ada 73.32%, guru semi layak mengajar 19.76% dan guru yang tidak layak ada 6.92%. Menurut data guru kualifikasi S1/D4, S2 dan S3 untuk guru SMA ada 5.149 orang, sedangkan guru SMK sebanyak 5.785 orang. Untuk guru SMA yang sudah mendapatkan sertifikasi ada sejumlah 1.361 orang atau sebesar 26.43% dan untuk guru SMK ada sebanyak 1.408 orang atau sebesar 24.34%.

Fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah meliputi perpustakaan dimana untuk SMA memiliki 173 perpustakaan, MA sebanyak 32 dan SMK sendiri ada 160 buah. Lapangan olahraga yang dimiliki SMA sebanyak 111 lapangan, 20 lapangan untuk MA dan 66 lapangan ada di SMK. UKS SMA sebanyak 157 buah, 24 bagi MA dan 150 terdapat di SMK. Laboratorium SMA sejumlah 669 buah, 91 lab untuk MA dan 343 lab di SMK. Ruang ketrampilan dimiliki SMA tersedia 88 ruang, 25 ruang untuk MA dan 79 ruang untuk SMK. Ruang BP terdapat 155 ruang pada SMA, 31 ruang di MA dan 162 ruang bagi

SMK. Ruang serbaguna sejumlah 84 ruang di SMA, 17 ruang untuk MA dan 64 ruang pada SMK. Sedangkan bengkel hanya dimiliki oleh SMK sebanyak 147 ruang. Untuk ruang praktek yang terdapat di SMA sebanyak 16 ruang, MA sebanyak 11 dan SMK sebanyak 352 ruang.

Indikator pendidikan pada SMA/MA/SMK dapat dijabarkan pada pencapaian APK SM sebesar 81.51%, APM SM yang mencapai 59.12%, APS Anak Usia Sekolah 16 – 18 th sebesar 68.41%. Angka melanjutkan sebesar 92.54%, dimana angka kelulusan mencapai 88.68%, untuk angka mengulang sebesar 0.54% sedangkan angka putus sekolah mencapai 0.26%. Untuk rasio kelas/ruang kelas sebesar 0.89, rasio siswa perkelas ada 30, dan rasio siswa/guru sebesar 9.

Sedangkan nilai rata-rata hasil ujian nasional SM untuk tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut :

* Bahasa Indonesia SMA	: 7.07
* Bahasa Inggris SMA	: 7.47
* Matematika SMA	: 6.64
* Bahasa Indonesia SMK	: 7.05
* Bahasa Inggris SMK	: 7.29
* Matematika SMK	: 7.74
* Bahasa Indonesia MA	: 6.66
* Bahasa Inggris MA	: 6.69
* Matematika MA	: 6.30

Dari segi manajemen, sekolah sudah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan bekerjasama dengan Komite sekolah, namun demikian dari segi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pelaksanaannya masih belum optimal dan belum menunjukkan hasil yang signifikan.

## **5. SLB – Sekolah Luar Biasa**

Jumlah SLB baik negeri maupun swasta yang terdapat di DIY saat ini berjumlah 62 sekolah, dimana 8 adalah SLB Negeri dan 54 merupakan SLB Swasta. SLB Negeri memiliki 217 kelas sedangkan swasta memiliki 754 kelas. Kelas-kelas tersebut tertampung dalam 172 ruang kelas bagi sekolah negeri dan 438 ruang kelas di sekolah swasta. Jumlah murid yang dimiliki SLB sebanyak 3.427 orang dengan rincian 946 murid bersekolah di negeri dan sisanya 2.481 orang memilih untuk bersekolah di SLB Swasta.

Guru yang dimiliki SLB untuk negeri sebanyak 355 guru dan 775 untuk swasta dengan total guru ada 1.130 orang. Sedangkan berdasar pada data guru kualifikasi S1/D4, S2 dan S3 guru SLB ada 678 orang, yang mana sebanyak 219 orang telah mendapatkan sertifikasi.

Keadaan SLB pada umumnya, seperti kondisi gedung, ketersediaan alat pelajaran, dan buku-buku masih belum memadai, sedangkan gurunya juga masih banyak yang berstatus honorer.

## **6. PT – Perguruan Tinggi**

Jumlah keseluruhan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di Provinsi DIY sejumlah 140 perguruan tinggi dengan rincian, 5 universitas negeri, 18 universitas swasta, 7 perguruan tinggi kedinasan, 4 institut, 42 sekolah tinggi, 8 politeknik, dan 56 akademi. Jumlah mahasiswa yang tertampung dalam 140 perguruan tinggi diatas sebanyak 255.593 orang, dimana mahasiswa negeri sebanyak 83.427 orang dan mahasiswa yang bersekolah di perguruan swasta ada 168.252 orang. Mahasiswa yang berada di DIY berasal dari 33 provinsi Indonesia dengan kisaran 96.80% dan mahasiswa asing sebesar 3.2%.

Program studi yang diampu sudah demikian banyak macam dan ragam sesuai kebutuhan dan kemajuan jaman dan teknologi, dan ilmu yang ditawarkan adalah berbagai cabang keilmuan baik yang ilmu murni maupun ilmu terapan.

## **7. PNFI – Pendidikan Nonformal dan Informal**

Pendidikan nonformal dan informal yang meliputi pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini. Warga belajar sasaran program pendidikan luar sekolah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : jumlah penduduk sasaran pendidikan nonformal usia 0-6 th sebanyak 263.700 jiwa. Dimana sebanyak 2526 anak mengikuti pendidikan paud nonformal melalui 92 TPA, 27.520 anak belajar di 836 KB, 44.392 anak terdaftar di 1.155 SPS dengan jumlah total anak yang mengikuti pendidikan paud nonformal sebanyak 74.438 di 2.083 lembaga paud nonformal.

Sedangkan untuk PAUD formal yaitu TK dan RA ada 80.210 anak yang mengikuti pendidikan di 2.138 TK/RA formal. Sehingga anak yang terlayani baik formal dan nonformal sejumlah 170.165 anak, jumlah belum terlayani ada 100.478 anak. Prosentase anak terlayani baik formal maupun nonformal adalah

64.53%, dan untuk prosentase terlayani paud nonformal ada sebesar 28.23%. Untuk prosentase terlayani paud formal sendiri sebesar 30.42%.

Jumlah penduduk buta aksara usia 15-44 th yang terdata ada sebanyak 8.155 orang, buta aksara usia 45-60 th sebanyak 24.169 orang, dan untuk buta aksara usia diatas 60 th ada sejumlah 25.525 orang. Program pemberantasan buta aksara dengan kelompok usia 15-60 th dibagi untuk APBN dengan sasaran program buta aksara sebanyak 24.610 orang sedangkan untuk APBD sejumlah 5.000 orang.

Jumlah siswa putus sekolah tingkat SD/MI sebanyak 195 siswa, siswa putus sekolah tingkat SMP/MTs adalah 272 siswa sedangkan siswa putus sekolah tingkat SMA, MA dan SMK ada 307 orang. Warga belajar keaksaraan fungsional yang terdata ada 45.717 orang, warga belajar kejar paket A sebanyak 783 orang, warga belajar kejar paket B sebanyak 14.973 orang dan warga belajar kejar paket C sejumlah 3.520 orang.

Jumlah lembaga penyelenggaraan program PNFI untuk PAUD yang terdiri dari 868 KB, 100 TPA dan 2.176 SPS. Kelompok Belajar sebanyak 3.632, TBM 262, PKBM 276 dan kursus sebanyak 270. SKB ada sebanyak 5 SKB, dan untuk lembaga penyelenggara lainnya terdapat 21 lembaga. Pendidik untuk Pendidikan nonformal (PNF) Pendidik PAUD sebanyak 9.376 orang, pendidik KF 3.916 orang, pendidik kesetaraan 4.058 orang, pendidik kursus 1.372 orang dan untuk pamong belajar yang terdapat di SKB sebanyak 44 orang, pamong belajar yang terdapat di BPKB sebanyak 18 orang. Untuk tenaga kependidikan PNF, tenaga kependidikan untuk PAUD sebanyak 5.376 orang, tenaga kependidikan KF sejumlah 1.447 orang, tenaga kependidikan kesetaraan ada 1.037 orang, tenaga kependidikan kursus sebanyak 370 orang, tenaga kependidikan untuk TBM 377 orang dan tenaga kependidikan PKBM 827 orang. TLD ada sebanyak 13 orang, FDI (fasilitator desa intensif) sebanyak 6 orang dan 68 orang adalah penilik.

## **8. Pemuda dan Olahraga**

Organisasi pemuda yang tercatat di DIY ada sebanyak 35 organisasi, sedangkan untuk organisasi olahraga sendiri ada 50 organisasi. Telah diberikan juga beasiswa kursus/magang kepada 3.197 orang, dan kelompok belajar usaha yang tercatat sebanyak 817 kelompok. Sedangkan dalam pencapaian prestasi bidang olahraga, target yang diinginkan adalah mencapai prestasi 10 besar nasional, dan semakin memasyarakatnya olahraga sebagai kebutuhan untuk

menunjang kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat Yogyakarta pada umumnya sebagai sarana menciptakan masyarakat sehat yang berdaya guna dan mampu memiliki sikap dan sifat sportif, jujur dan adil.

### **BAB III**

## **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **A. Faktor-Faktor Lingkungan**

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, and threat*).

##### **1. Analisis Faktor Lingkungan Internal**

###### **a. Kekuatan (*Strengths*)**

1. Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.
2. SDM Dinas Dikpora yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketersedianya setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat umum.
4. Letak, lokasi dan kondisi yang kondusif dari setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang ada di DIY.
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di DIY.
6. Kebudayaan lokal yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat Yogyakarta sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.
7. Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman (*up to date*) dan teknologi.
8. Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

###### **b. Kelemahan (*Weakness*)**

1. Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana reward and punishment belum menjadi bagian utama dalam indicator keberhasilan kinerja.

2. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Dikpora yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.
3. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal di bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.
4. Pengkoordinasian serta pensinkronisasian program kegiatan Dinas Dikpora yang belum optimal.
5. Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global.
6. Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “*outside the box*” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran luar biasa sebagai penerobos dalam membangun program-program kegiatan baru peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan saat ini.
7. Persaingan dan pertarungan yang ketat antar lembaga /institusi pendidikan dalam meraih siswa-siswi didiknya yang mana hal ini diluar kontrol Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga/Pemerintah Provinsi DIY sehingga dapat merugikan masyarakat secara umum.
8. Kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY yang tidak jelas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam pengelolaan di bidang pendidikan.
10. Belum adanya Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DIY.

## **2. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal**

### **a. Peluang (*Opportunities*)**

1. Yogyakarta dengan predikat “Kota Pendidikan” meski memiliki saingan masih merupakan tujuan utama pilihan orang tua siswa dari luar daerah untuk menyekolahkan anaknya.
2. Yogyakarta dengan kondisi dan lingkungan yang cenderung tenang, dengan ritme masyarakat yang pelan, tenang dan tidak terburu-buru menjadikan Yogyakarta damai dan tenang.
3. Kebudayaan Jawa yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta sebagai wujud tatanan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati.

4. Pola hidup bermasyarakat yang masih memegang teguh aturan dan budaya setempat, dimana tanggung rasa dan gotong royong masih ada dalam lingkungan masyarakat.
5. Kepedulian dan apresiasi masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan yang kuat dan tinggi, diwujudkan dengan berdirinya berbagai macam lembaga dan institusi pendidikan baik formal maupun non formal, membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagai pelajar maupun pun pengajar.
6. Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
7. Adanya kesamaan pandangan dan pemahanan yang komprehensif dalam masyarakat (stakeholder) untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan dan pusat kebudayaan.
8. Kemudahan dalam memperoleh sarana prasarana untuk mengakses sistem teknologi informasi, baik dalam lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat.
9. Biaya hidup sehari-hari, baik tempat tinggal, makan sehari-hari maupun hiburan di Yogyakarta masih murah dan terjangkau.
10. Perhatian dan apresiasi pengusaha/IKADIN Yogyakarta terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan masih tinggi.
11. Potensi Sumber Daya Manusia pemuda dalam pembangunan.
12. Berkembangnya industri barang dan jasa memberikan peluang peningkatan kemandirian ekonomi pemuda.
13. Banyaknya Penyelenggaraan event olahraga di Provinsi DIY dan perusahaan sponsor yang memberi peluang untuk membudayakan olahraga dan penambahan ruang publik untuk olahraga.

**b. Ancaman (*Threats*)**

1. SDM yang dikhawatirkan belum siap menghadapi globalisasi dan kekhawatiran mengenai ketidaksiapan masyarakat pendidikan dalam menghadapi arus globalisasi dengan segala pengaruhnya dalam perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan, ketrampilan maupun keahlian.
2. Persaingan dengan daerah atau provinsi lain dalam menciptakan image sebagai kota pendidikan, dimana dapat dimungkinkan Daerah Istimewa

Yogyakarta bukan lagi menjadi satu-satunya daerah yang menjadi pilihan orang tua siswa.

3. Ancaman nazpa dan penyakit masyarakat lainnya yang berkembang, yang dapat merusak nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan Pendidikan.
4. Perubahan pengelolaan lembaga dan institusi pendidikan yang secara perlahan berubah menjadi tujuan bisnis, bukan lagi mengedepankan pendidikan melainkan profit lembaga /institusi.
5. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih belum merata dan rendah sehingga kesempatan memperoleh pendidikan belumlah setara diantara masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri.
6. Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, seperti penggunaan bahasa Jawa yang semakin luntur serta unggah-ungguh terhadap kaum yang lebih tua akibat pola asuh anak-anak yang terlalu berkiblat pada nilai-nilai praktis sehingga anak-anak kurang mengenal tata karma, budi pekerti dan sopan- santun.
7. Belum ditaatinya semua aturan-aturan hukum yang ada oleh masyarakat, hukum belum dipandang sebagai dasar bentuk kenyamanan dalam bermasyarakat melainkan sebagai sesuatu yang dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan keinginan masyarakat.
8. Tata kelola dan tata letak kota yang masih belum baik sehingga berkesan semrawut dan tidak rapi, sehingga mengurangi nilai-nilai kenyamanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Budaya persaingan positif bagi sebagian masyarakat masih rendah.
10. Penurunan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar pada perguruan-perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Analisis Lingkungan Strategis**

Analisis lingkungan strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, and threat*) terhadap faktor-faktor lingkungan internal maupun faktor-faktor lingkungan eksternal telah kemukakan seperti di atas. Berdasarkan analisis tersebut ditarik asumsi-asumsi untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dan ancaman kegagalan. Analisis SWOT yang dimaksud, seperti berikut ini:



### **C. Asumsi Pilihan dan Pilihan Strategis**

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang diemban sebagai kriteria, maka dihasilkan asumsi pilihan strategis sebagai berikut:

1. Kembang dan tingkatkan kepercayaan masyarakat termasuk masyarakat di luar DIY bahwa DIY adalah kota pendidikan terkemuka. Peningkatan kualitas di semua sumberdaya pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan adalah mutlak.
2. Kembangkan dan manfaatkan apresiasi masyarakat DIY yang cukup baik terhadap pendidikan untuk mendukung terciptanya lembaga pendidikan yang kompetitif dan lingkungan yang kondusif.
3. Tingkatkan kualitas profesionalisme dan komitmen aparat dinas, penyelenggara lembaga pendidikan serta tingkatkan manajemen pendidikan di Provinsi DIY.
4. Tumbuh kembangkan moral kerja pada semua sumber daya manusia pendidikan dengan menerapkan "*reward and punishment*" untuk memperoleh SDM yang berkualitas kompetitif.
5. Manfaatkan dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain seperti Kadin dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
6. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi disemua program pendidikan baik antar pemerintah, lembaga pendidikan maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk menghindari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga serta mengantisipasi perkembangan persaingan.
7. Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya pendidikan yang berdaya saing tinggi.
8. Cipta dan kembangkan pusat informasi pusat informasi pendidikan dan promosi pendidikan.
9. Manfaatkan hasil penelitian yang komprehensif dalam penerapan kebijakan baru, untuk menghindari bongkar pasang kebijaksanaan.
10. Adakan "Penilaian penyelenggaraan pendidikan" di tingkat daerah untuk mengetahui kelayakan sebuah institusi pendidikan yang berkualitas.
11. Manfaatkan kewenangan yang ada untuk memfasilitasi Perguruan Tinggi, agar ada kesamaan kualitas di semua perguruan tinggi.
12. Ciptakan kegiatan yang dapat berlangsungnya akulturasi budaya antara pendatang dan tuan rumah, sehingga tercipta saling pengertian.

13. Penerapan dan penggunaan nilai-nilai budaya sebagai kearifan dan keunggulan lokal dalam pendidikan, sehingga membentuk anak-anak didik yang memiliki kekhasan dan karakter berbudaya yang adiluhur.
14. Adakan kampanye anti napza dan penyakit masyarakat lainnya serta tegakkan supremasi hukum.
15. Dorong dan fasilitasi terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif terhadap pendidikan dan ikut menjadikan lingkungan yang siap bersaing.
16. Peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan.
17. Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
18. Perlu ada Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di DIY sebagai dasar legal serta perangkat menghadapi perkembangan.

#### **D. Faktor Penentu Keberhasilan**

Pilihan yang ditetapkan menjadi faktor kunci keberhasilan adalah berikut :

1. Adanya hubungan yang baik antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota).
2. Adanya dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
4. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
5. Nilai-nilai luhur dari budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter dan budi pekerti luhur dari anak-anak didik.
6. Peningkatan SDM yang professional dan kompeten dengan penerapan system “reward and punishment” yang berkeadilan.
7. Jalinan hubungan dan dukungan yang harmonis dan sinkron dari semua sumber daya pendidikan yang ada.
8. Penciptaan lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ketrampilan dan kemandirian serta meminimalkan dampak negative globalisasi bagi pemuda.
9. Penciptaan lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat.

### **E. Faktor Ancaman Kegagalan**

Faktor-faktor yang dapat menjadi ancaman kegagalan adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya (masyarakat) pendidikan belum siap mengantisipasi persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Hubungan yang harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum tidak tercipta.
3. Kesadaran hukum dan tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan hukum masih belum terbentuk dengan sempurna.
4. Kesulitan dalam masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi dan mengurangi masalah napza dan penyakit masyarakat lainnya, karena kurangnya kesatuan rasa dan sepenanggungan tindakan sebab akibat.
5. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pendidikan dimana kemudahan akses memperoleh system informasi teknologi masih digunakan hanya sebatas chatting maupun browsing situs-situs non pendidikan.
6. Menipisnya rasa memiliki akan budaya, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti serta pemahaman mengenai budaya yang dimiliki dalam diri generasi muda saat ini, dengan alasan modernitas.
7. Masih adanya ketakutan akan dibukanya pasar bebas dalam era globalisasi akibat kurangnya pemuda dalam membekali diri dengan ketrampilan atau keahlian yang dibutuhkan.
8. Belum memasyarakatnya olahraga dalam masyarakat serta masih rendahnya kesadaran akan pentingnya berolahraga dalam menjaga kesehatan dan kebugaran masyarakat.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Dasar Filosofis**

Filosofi yang mendasari pembangunan pendidikan di Provinsi DIY adalah ***Hamemayu Hayuning Bawana*** sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berpendidikan, berketrampilan dan memiliki keahlian dengan berdasarkan pada nilai budaya.

Hakekat budaya adalah hasil ***cipta, karsa dan rasa***, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ***gemah ripah loh jinawi, ayom, tata, titi, tentrem, kerta raharja***, dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar dengan didasari pada kemampuan dan pengetahuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi dan daya saing tinggi akibat pendidikan, ketrampilan maupun keahlian yang dipelajari dan dimilikinya.

***Hamemayu Hayuning Bawana*** mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

#### **B. Visi**

**”MENJADI KATALISATOR TERWUJUDNYA MASYARAKAT PENDIDIKAN  
YANG SEHAT, MANDIRI, PROFESSIONAL DAN BERBUDAYA”**

Dengan peran menjadi katalisator bermakna bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya menempatkan diri sebagai lembaga yang ikut mengilhami, mendorong, dan memacu tumbuh kembangnya masyarakat pendidikan yang kompetitif, pemuda yang mampu bersikap

mandiri dan berkembang serta kehidupan berolahraga yang lebih professional dan maju. Dengan peran ini bermaksud meletakkan posisi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagai instansi pemerintah daerah dan masyarakat pada kedudukan yang sama, terutama dalam memikul tanggung jawab pendidikan.

Menempatkan pendidikan sebagai sarana mendidik terwujudnya masyarakat dengan pola pikir dan wawasan luas, pemuda sebagai tumpuan kemajuan dan perkembangan bangsa dan Negara, olahraga selaku wadah pembelajaran bersikap dan bersifat sportif, jujur dan mengenal cara bersaing dengan segenap kemampuan sendiri, bersikap pantang mundur, maju, tidak takut bersaing maka diharapkan akan tumbuh semangat dan daya saing tinggi dalam masyarakat pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menuju profesionalisme dengan tidak meninggalkan budaya lokal sebagai wujud karakter dan pembawaan diri yang matang.

Jika masyarakat pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah professional dan berbudaya, maka pada tahun 2025 telah dapat terwujud layanan Pendidikan prima untuk pengembangan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang utuh dan unggul serta siap memasuki kehidupan dunia nyata.

### **C. Misi**

Berdasarkan visi tersebut maka misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan
4. Mengembangkan pendidikan yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal
5. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.

### **D. Tujuan**

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan rumah tangga intern Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik

2. Peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan yang kompetitif sesuai dengan kompetensinya dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai ciri khas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi dan kompetitif.

#### **E. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan “intern” rumah tangga dalam mendukung Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sasaran : Terwujudnya aparatur yang mampu bersikap professional dan berkompeten atas tugas dan fungsi dan mampu menyesuaikan diri atas adanya perubahan kondisi maupun lingkungan kerja dengan sarana prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan dengan sasaran : Terwujudnya kualitas dan kuantitas hasil pendidikan formal, informal dan nonformal yang mampu bersaing secara lokal, nasional maupun internasional dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya sebagai wujud kearifan lokal.
3. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berpotensi dan kompetitif, dengan sasaran : tercapainya hasil pembinaan pemuda dan olahraga di Provinsi DIY yang kompetitif, mampu bersaing dengan positif dan berjiwa mandiri.

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolak ukur kinerja.

#### **A. Strategi**

- Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional dan internasional.
- Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan wawasan, keterbukaan dan toleransi.
- Peningkatan peranserta lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olahraga.
- Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian.
- Pembangunan pedesaan.
- Pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur.
- Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.

#### **B. Arah Kebijakan**

- Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas tenaga pendidik secara merata.
- Melestarikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain.
- Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.

- Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah pusat untuk mewujudkan berdirinya pusat teknologi dan industri (Techno-Industrial Park).
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
- Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.
- Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
- Mendorong kegiatan olahraga andalan daerah yang disertai peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan.
- Meningkatkan iklim usaha yang mendukung Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kewirausahaan.
- Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
- Memfasilitasi model pelatihan ketrampilan dan keahlian kepada pemuda.
- Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.
- Meningkatkan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
- Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam pelayanan publik.

### **C. Program**

- Pendidikan :
  - a) Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - b) Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  - c) Program Pendidikan Menengah
  - d) Program Pendidikan Non Formal
  - e) Program Pendidikan Luar Biasa
  - f) Program Pendidikan Tinggi
  - g) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - h) Program Manajemen Layanan Pendidikan
  - i) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
- Pemuda dan Olahraga :
  - a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - b) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

- c) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- d) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
- e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

#### D. Indikator

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2009	2010	2011	2012	2013
1. Angka Melek Huruf	Persen	94.90	96.98	98.93	100	100
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12.20	12.10	12.05	12.05	12
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
a. PAUD	Persen	64.53	70	75	80	85
b. SD/MI	Persen	108.82	110	110	110	110
c. SMP/MTs	Persen	114.98	116	116	116	116
d. SM	Persen	81.51	82	84	87	90
e. PLB	Persen	82	85.50	89	92.50	95
4. Angka Partisipasi Murni (APM) :						
a. SD/MI	Persen	94.73	95.20	95.25	95.30	95.35
b. SMP/MTs	Persen	84.64	86	87.50	89	91.50
c. SM	Persen	59.12	60.50	62	63.50	65
5. Angka Kelulusan :						
a. SD/MI	Persen	99.65	99.75	99.95	100	100
b. SMP/MTs	Persen	90.18	91.68	93.18	94.68	93.18
c. SM	Persen	88.68	90.18	91.68	93.18	94.68
6. Angka Putus Sekolah :						
a. SD/MI	Persen	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02
b. SMP/MTs	Persen	0.33	0.30	0.27	0.24	0.21
c. SM	Persen	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44
7. Jumlah Prestasi Siswa Dalam Olimpiade/Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional						
a. SD/MI						
- Nasional	Peringkat	5	5	4	4	3
b. SLTP/MTs						
- Nasional	Peringkat	5	5	4	4	3
- Internasional	Event	-	1	1	1	1
c. SM						
- Nasional	Peringkat	5	5	5	4	4
- Internasional	Event	1	1	1	2	2

8. Jumlah Sekolah Standar Nasional						
a. SD/MI	Sekolah	55	100	150	200	250
b. SMP/MTs	Sekolah	71	100	125	150	180
c. SM	Sekolah	79	92	105	121	137
9. Jumlah Sekolah Bertaraf Internasional						
a. SD/MI	Sekolah	5	6	7	8	10
b. SMP/MTs	Sekolah	12	12	12	13	23
c. SM	Sekolah	26	25	25	25	65
10. Jumlah Sekolah berbasis Keunggulan Lokal						
	Sekolah	1	2	3	4	5
11. Jumlah Lembaga PNF Memenuhi Standar Nasional						
	Lembaga	20	35	45	65	80
12. Prestasi Kejuaraan PNF						
	Peringkat	2	1	1	1	1
13. Jumlah Mahasiswa						
	Orang	260.760	270.405	280.550	290.520	300.605
14. Jumlah Mahasiswa Asing						
	Orang	600	725	990	1.015	1.050
15. Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda						
	Unit	2	4	6	8	10
16. Prestasi Olahraga Tingkat Nasional						
a. POPNAS	Peringkat	10	-	10	-	10
b. POSPENAS	Peringkat	-	5	-	3	-
c. PON	Peringkat	-	-	-	10	-
17. Persentasi peningkatan sarana prasarana olahraga						
	Persen	75	100	100	100	100

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013 merupakan penjabaran dari visi, misi program Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu pada RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2009 – 2013 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dengan pelaksana harian Bidang Perencanaan dan Standarisasi.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Prov. DIY.
3. Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2009 – 2013 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung visi, misi, tujuan dan strategi yang ada dalam Renstra Tahun 2009 – 2013.
5. Agar Renstra Tahun 2009 – 2013 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat dan UPT perlu mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2009 – 2013 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, instansi terkait maupun masyarakat luas.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2009 – 2013, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2009 – 2013, sebagai berikut :

- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dilakukan oleh masing-masing kepala bidang teknis dan UPT.
- b. Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang dan UPT pelaksana sesuai tugas dan kewenangannya.
- c. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD periode sebelumnya.
- d. Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi menyusun evaluasi rencana kerja berdasar hasil evaluasi Kepala SKPD.
- e. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2009 – 2013 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Yogyakarta, 10 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prof. SUWARSIH MADYA, Ph.D  
NIP 19520715 197703 2 002